

Tito Diminta Kembalikan 4 Pulau dari Sumut ke Aceh.....

Dari Halaman 1

itu menjelaskan bahwa masyarakat di empat pulau itu sejak dulu telah mengantongi KTP Aceh. Menurut dia, alasan itu telah menjadi dasar Pulau Panjang hingga Mangkir Ketek tak perlu dipindahkan.

"Itu dari dulu masyarakat di sana itu sudah ber-KTP Aceh, jadi semuanya udah ada dasarnya Aceh. Enggak ada dasar Sumatera Utara di situ," katanya.

Mendagri Tito dituding buat gaduh

Dek Gam meminta Menagri Tito Karnavian lebih baik mengurus persoalan lain. Menurut dia,

Kronologi Sengketa

Dari Halaman 1

terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

"Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang," kata Safrizal mengutip Antara, Rabu (11/6).

Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

"Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat," ujarnya.

Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

"Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian," ujar Syafrizal.

Kemudian, pada 2009 hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu

Mendagri Tito: Sengketa Sudah Ada Sejak 1928

Dari Halaman 1

ta pulau itu dengan melibatkan banyak instansi dan pihak-pihak berkepentingan.

"Dari tahun 1928 persoalan ini sudah ada. Prosesnya sangat panjang, bahkan jauh sebelum

KKP Ungkap Bahaya Penambangan

Dari Halaman 1

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP Ahmad Aris menyoroti kerentanan ekosistem pesisir akibat sedimentasi dari pertambangan serta menyinggung urgensi harmonisasi regulasi lintas sektor.

Aris menyebut lima pulau yang menjadi lokasi pertambangan nikel di Raja Ampat seluruhnya termasuk dalam kategori pulau sangat kecil, mengacu pada klasifikasi tiny island menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

"Karena di UNCLOS menyatakan bahwa pulau yang ukurannya di bawah 100 km persegi atau di bawah 10 ribu hektare, itu namanya tiny island, pulau sangat kecil," ujarnya di KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Ia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pertambangan tidak termasuk dalam kegiatan yang diprioritaskan di pulau kecil.

"Di dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 disebutkan di Pasal 2.3 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan. Itu artinya bahwa diprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan selain pertambangan," lanjutnya.

Selain itu, Aris mengutip UU 27/2007 yang mengatur larangan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil jika menimbulkan kerusakan lingkungan atau dampak sosial.

"Kalau tidak salah, dilarang melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil, apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan, memberikan dampak sosial, itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK bahwa itu tidak diperbolehkan,"

Kejujuran Lebih Utama dalam Memimpin

Dari Halaman 1

pada Selasa, 12 Juni 2025, di kampus UINSU Jalan Lapangan Golf, Tuntungan.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Mesiono menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai dasar pengambilan keputusan dan perilaku organisasi.

"Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran. Kepintaran bisa dilatih, tetapi kejujuran adalah nilai dasar yang harus dimiliki setiap pemimpin. Siapa yang jujur, pasti akan membawa kebaikan dan memiliki kecerdasan dalam tindakannya," ujarnya di hadapan civitas akademika FIS UINSU.

Mengutip pemikiran sufi Jalaluddin Rumi, Prof. Mesiono mengatakan, "Orang pintar belum tentu jujur, tetapi orang jujur sudah pasti pintar." Ia menambahkan, kejujuran melahirkan ketenangan hidup, sementara kegalauan

Los Angeles

Dari Halaman 1

Dalam video yang beredar tampak toko perhiasan dirusak dan barang dagangan dikeluarkan dari rak.

Menurut catatan LADP, mereka telah menangkap 14 orang dalam penjarahan itu.

Lebih lanjut, polisi menjelaskan petugas me-

keputusan Mendagri hanya bikin gaduh.

"Mendagri lebih baik ngurus yang lain lah. Enggak usah cawe-cawe hal gini, bikin gaduh aja Mendagri ini," kata Dek Gam.

Status administrasi perubahan status empat pulau itu tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Sebelumnya empat pulau itu dimiliki oleh warga Aceh dengan dokumen sah serta ditandai dengan adanya prasasti yang dibangun oleh Pemkab Aceh Singkil pada 2008.

Tito mengatakan, pemerintah pusat tidak memi-

yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

Kemudian hasil konfirmasi kepada Gubernur Aceh beserta hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara saat itu beserta hasil pelaporan pada PBB tahun 2012 dan menetapkan status empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek yang tidak lagi bagian dari Provinsi Aceh. Pulau itu, kini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Dikatakan Tito, persoalan ini memiliki sejarah panjang dan melibatkan banyak pihak serta instansi sejak awal konflik itu muncul pada 1928.

"Dari tahun 1928 persoalan ini sudah ada. Prosesnya sangat panjang, bahkan jauh sebelum saya menjabat. Sudah berkali-kali difasilitasi rapat oleh berbagai kementerian dan lembaga," ujarnya.

Tito menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya terjadi antara Aceh dan Sumut. Saat ini terdapat ratusan kasus serupa di seluruh Indonesia.

Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, baru sekitar seribu desa yang batas wilayahnya benar-benar telah selesai secara hukum, kata Tito.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian batas wilayah sangat penting karena menyangkut kepastian hukum, penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), tata ruang, dan perencanaan pembangunan.

saya menjabat. Sudah berkali-kali difasilitasi rapat oleh berbagai kementerian dan lembaga," ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Tito menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya terjadi antara Aceh dan

jelasnya.

Sejauh ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahliu Lahadlia telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap persoalan ini.

Mengenai pengawasan di lapangan, Aris menyebut lokasi pertambangan berada di kawasan hutan, sehingga perizinannya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Kalau kami itu memberikan perizinan di pada areal penggunaan lainnya. Itu tentunya sesuai dengan rencana tata ruang," ujarnya.

Ia menambahkan meskipun bukan wilayah kerja utama KKP, tim dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tetap melakukan pemantauan.

Menurutnya, salah satu dampak utama dari aktivitas pertambangan di wilayah pesisir adalah sedimentasi.

"Kalau dari atas misalnya ada hujan, mengalir ke laut, sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun, dan sebagainya," kata Aris.

Ia menjelaskan, terganggunya ekosistem pesisir berdampak langsung pada tempat pemijahan ikan dan kegiatan wisata bahari.

Ia juga menyoroti ketimpangan kewenangan dalam pemberian izin antara sektor kehutanan dan kelautan. Menurut Aris, meski secara hukum KKP masih dapat memberikan rekomendasi izin di kawasan hutan, praktiknya berbeda dalam sistem perizinan daring terpadu OSS (Online Single Submission).

Aris menilai perlunya harmonisasi lintas kementerian agar proses pemberian izin di pulau kecil menjadi lebih jelas.

seringkali bermula dari kebohongan.

Prof. Mesiono juga mengingatkan bahwa organisasi yang dipimpinnya adalah amanah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, menurutnya, kepemimpinan harus dijalankan dengan kesungguhan, integritas, dan tanggung jawab spiritual.

Dalam pidatonya, Prof. Mesiono juga mengutip tokoh hak asasi manusia Martin Luther King Jr. yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang hebat adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan orang-orang di sekitarnya. "Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi bagaimana kita bisa membuat orang lain tumbuh dan berkembang melalui kepercayaan dan tanggung jawab," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola fakultas. Menurutnya, transparansi dan komunikasi dua arah antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan

nantkap seorang perempuan karena perampokan di Apple Store dan dua orang lain arena melakukan penjarahan.

LAPD juga menjelaskan dua petugas terluka dan dibawa ke rumah sakit saat berusaha mengamankan situasi, demikian dikutip NBC News.

Situasi yang memanas membuat Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengumumkan keadaan darurat dan menetapkan jam malam pada Selasa

liki kepentingan pribadi terhadap perubahan status empat pulau itu, melainkan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal.

Tito menjelaskan, batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara.

"Batas daratnya sudah selesai, antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah. Ditandatangani dua belah pihak, cuma batas lautnya," kata Tito di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6).**(cnni/js)**

Jika batas tidak jelas, kata Tito, pembangunan di wilayah sengketa bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau satu wilayah membangun, padahal status lahannya masuk dalam sengketa, itu bisa jadi masalah hukum. Batas wilayah harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi ke depannya," katanya.

Terkait dengan empat pulau yang disengketkan, Tito menjelaskan bahwa batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumut.

Dikatakan Tito, Keputusan itu yang kemudian dituangkan dalam Kepmendagri tahun 2022 dan ditegaskan kembali pada April 2025.

"Keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak," katanya.

Namun, batas lautnya masih belum menemui titik temu. Karena tidak ada kesepakatan, kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada pemerintah pusat, kata Tito. Ia juga menambahkan bahwa penegasan nama wilayah sudah dilakukan, namun proses penyelesaian batas wilayah secara keseluruhan masih berjalan.

Anggota DPR asal Dapil Aceh I, Nazaruddin Dek Gam meminta empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut dikembalikan ke Aceh. Dek Gam mengkritik keputusan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan empat pulau tersebut kini masuk wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh," kata Dek Gam saat dihubungi, Rabu (11/6).**(anti/js)**

Sumut. Saat ini terdapat ratusan kasus serupa di seluruh Indonesia.

Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, baru sekitar seribu desa yang batas wilayahnya benar-benar telah selesai secara hukum, kata Tito.**(cnni/js)**

"Ke depan KKP akan melakukan review terhadap peraturan yang terkait di pulau-pulau kecil. Supaya terjadi harmonisasi, sehingga dengan seperti itu ke depan pulau-pulau kecil ini akan clear bisnis proses perizinannya," ujarnya lebih lanjut.

Terkait jalur logistik pertambangan yang melalui laut, Aris menegaskan hal tersebut sudah diatur dalam rencana tata ruang laut nasional.

KKP sendiri telah memiliki data sebaran pulau-pulau kecil di Indonesia melalui sistem SIAP (Sistem Informasi Pulau-Pulau Kecil), meskipun Aris mengakui belum tersedia dalam format real-time.

"Tapi yang mana izin, yang mana kondisi itu sudah ada. Tapi mungkin ke depan akan kita terus perbaiki dan update," tutur Aris.

Menanggapi isu lebih luas, Aris mengatakan KKP terus melakukan inventarisasi lokasi pertambangan di pulau kecil, termasuk di luar Raja Ampat.

"Besok saya ke Kepulauan Riau. Bersama Pak Dirjen (PSDKP) dan Kejaksaan Agung. Di Kepulauan Riau itu banyak sekali pulau yang ditambang. Jadi kita terus melakukan upaya ini. Sampai nanti harmonisasi aturan," tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki IUP di wilayah Raja Ampat.

Dua perusahaan, PT GAG Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP), mendapat izin dari pemerintah pusat. Sementara tiga lainnya, PT Mulia Raymond Perka (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, mengantongi izin dari Pemerintah Daerah Raja Ampat.

Keberadaan dan aktivitas mereka telah menjadi sorotan menyusul pencabutan IUP oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap empat di antaranya.**(cnni/js)**

progresif.

Sebagai bagian dari komitmennya, Prof. Mesiono berjanji akan mendorong kajian dan penguatan terhadap rumpun-rumpun ilmu yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Ia berharap kajian-kajian tersebut tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan-persoalan sosial di masyarakat.

"Saya mengajak seluruh sivitas akademika FIS untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi yang kuat. Kita harus bergandengan tangan menjadikan FIS sebagai fakultas terdepan, unggul dalam kualitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Mari kita jadikan kejujuran, keterbukaan, dan kerja sama sebagai napas dalam setiap langkah kita," pungkasnya.

Acara serah terima jabatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Suasana keakraban dan semangat baru tampak menyelubungi prosesi tersebut, menandai awal kepemimpinan baru Fakultas Ilmu Sosial UINSU yang diharapkan semakin dinamis, profesional, dan berintegritas.**(*)**

(10/6).

Tindakan itu juga untuk melawan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengerahkan pasukan Garda Nasional

Karen mengatakan jam malam itu mulai berlaku pada Selasa pukul 20.00 sampai Rabu pukul 06.00 waktu setempat. Jika ada yang kedapatan melanggar akan ditangkap dan dikenai hukuman.**(cnni/js)**

Wajah Baru

Dari Halaman 1

bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk 'penjara modern'.

Sorotan makin tajam ketika muncul dugaan ketiadaan izin mendirikan bangunan (IMB atau PBG), potensi keterlibatan oknum pejabat, hingga risiko kebocoran Penda-patan Asli Daerah (PAD). Karena itu tak heran, desakan kepada aparat penegak hukum pun bermunculan, agar dugaan pelanggaran ini diselidiki serius dan terbuka.

Merespons kekesiruhan ini, DPRD Kota Medan pun perlu segera memanggil Wali Kota dan Direksi PUD Pasar Medan untuk dimintai penjelasan resmi. Publik menuntut kejelasan—dari siapa penyewa, berapa nilai sewa, hingga bagaimana mekanisme kerja samanya.

Kasus ini bukan sekadar soal bangunan berubah rupa. Ia menyentuh hal yang lebih dalam: tentang hak publik atas ruang, soal keadilan sosial, dan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik bersama. Publik berharap, jika ada pelanggaran hukum, semua pihak yang terlibat bisa ditindak tegas—tanpa pandang bulu.**(*)**



Kejujuran: Fondasi Kepemimpinan yang Terlupakan

Dari Halaman 1

kian asing. Dalam banyak kasus, keberhasilan dinilai dari seberapa cepat seseorang mencapai target, bukan seberapa jujur ia dalam mencapainya. Maka, bukan hal yang mengejutkan jika budaya manipulatif tumbuh subur: laporan yang dipoles, kinerja yang direkayasa, hingga loyalitas yang dibeli. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa kejujuran adalah pilar utama bagi kepemimpinan yang langgeng dan membawa kemaslahatan.

Kepemimpinan dan Kepercayaan

Dalam dunia kepemimpinan, tidak ada aset yang lebih berharga daripada kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa dibangun melalui kejujuran. Ketika seorang pemimpin berkata apa adanya, mengakui kekeliruan, dan konsisten antara kata dan perbuatan, maka publik akan menaruh keyakinan bahwa ia layak diikuti. Sebaliknya, sekali saja kebohongan terungkap, maka semua pencapaian bisa runtuh dalam sekejap.

Kita bisa belajar dari pemimpin-pemimpin besar dunia yang menjadikan kejujuran sebagai nilai utama. Abraham Lincoln dijuluki "Honest Abe" karena reputasinya yang tak pernah menipu rakyat. Nelson Mandela memenangkan hati bangsanya bukan hanya karena perjuangan politiknya, tetapi karena ketulusan dan integritas yang ia tunjukkan, bahkan kepada lawan politiknya. Di Indonesia, tokoh-tokoh seperti Bung Hatta dan KH. Agus Salim dikenang bukan semata karena orasi mereka, tetapi karena kejujuran yang melekat dalam pribadi mereka.

Dalam konteks spiritual, kejujuran bukan sekadar nilai moral, tetapi juga ibadah. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai "al-Amin"—yang terpercaya—jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Bahkan dalam khazanah sufistik, kejujuran adalah pintu menuju kebenangan batin. Jalaluddin Rumi, sufi besar dari Persia, menulis: "Orang pintar belum tentu jujur, tetapi orang jujur pasti cerdas dalam hatinya." Ungkapan ini bukan hanya indah, tetapi juga menggugah kita untuk menimbang ulang ukuran keberhasilan dalam kepemimpinan.

Kejujuran dan Transparansi

Salah satu turunan dari kejujuran adalah transparansi. Pemimpin yang jujur tidak akan merasa terancam dengan kritik, karena ia tidak menyembunyikan apa pun. Ia akan membuka ruang dialog, mengakui jika ada kekurangan, dan bersedia melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Inilah yang membedakan antara pemimpin demokratis dan pemimpin manipulatif.

Sayangnya, dalam banyak organisasi, transparansi justru dianggap kelemahan. Informasi dikunci rapat, data diseleksi sedemikian rupa untuk menampilkan citra yang baik, dan kritik dikerdilkan sebagai bentuk pembangkangan. Budaya seperti ini bisa bertahan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang hanya akan melahirkan ketimpangan, konflik internal, dan erosi kepercayaan.

Sebaliknya, pemimpin yang jujur cenderung membangun organisasi yang sehat dan progresif. Ia tidak sibuk menjaga pencitraan, tetapi fokus menciptakan iklim kerja yang terbuka. Ia tidak takut kehilangan kekuasaan, karena ia memimpin bukan untuk kekuasaan itu sendiri, melainkan untuk melayani dan memperbaikinya.

Kepemimpinan Sebagai Amanah

Dalam tradisi Islam, kepemimpinan bukanlah hak, melainkan amanah. Sebuah tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kejujuran menjadi syarat mutlak dalam menjalankan kepemimpinan. Tanpa kejujuran, amanah akan berubah menjadi pengkhianatan.

Penting untuk diingat bahwa kejujuran bukan berarti kelemahan. Menjadi jujur tidak sama dengan bersikap lunak atau naif. Justru kejujuran membutuhkan keberanian yang besar—berani mengakui kesalahan, berani berkata benar di tengah tekanan, dan berani menolak kompromi yang melanggar nilai.

Itulah mengapa kepemimpinan yang jujur juga akan melahirkan keteladanan. Ia tidak sekadar memerintah, tetapi menunjukkan jalan. Ia tidak hanya memberi instruksi, tetapi hidup dalam prinsip yang ia serukan. Ketika pemimpin jujur, maka ia menjadi kompas moral bagi seluruh organisasi.

Relevansi di Era Krisis

Di era digital saat ini, di mana informasi mudah tersebar dan publik semakin kritis, kejujuran menjadi semakin relevan. Pemimpin yang menutupi fakta atau memanipulasi data akan cepat terbongkar. Media sosial telah menjadi ruang publik baru, tempat publik menuntut transparansi dan integritas. Kejujuran bukan lagi pilihan idealistik, tetapi keharusan strategis.

Namun, kejujuran tidak bisa hanya menjadi jargon. Ia harus menjadi budaya yang hidup, yang dimulai dari pucuk pimpinan dan meresap ke seluruh elemen organisasi. Untuk itu, perlu keberanian dari para pemimpin untuk menjadikan kejujuran sebagai napas dalam setiap langkah kebijakan, bukan hanya dalam pidato seremonial.

Penutup

Seorang pemimpin yang jujur mungkin tidak selalu disukai semua pihak, apalagi dalam sistem yang telah lama dibiasakan dengan keputus-putus. Tetapi dalam jangka panjang, dialah yang akan dikenang. Karena kejujuran bukan hanya menciptakan prestasi, tetapi juga meninggalkan warisan moral yang abadi.

Saatnya kita menempatkan kejujuran kembali di posisi terhormat dalam kepemimpinan. Bukan sebagai slogan, melainkan sebagai kompas. Sebab ketika kejujuran hadir, maka arah kepemimpinan tidak akan tersesat.